

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA RANGA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG

Financial Performance Analysis of Ranga Village Government, Enrekang District, Enrekang Regency

Irmawati Aziz¹, Syarifuddin Yusuf², Yasri Tarawiru³

Email: irmaaziz718@gmail.com¹, yusufsyarif64@gmail.com², yasri.se.ak@gmail.com³

^{1,2}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pada periode 2021-2023 menggunakan tiga indikator utama yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata capaian 98,11%, meskipun terjadi penurunan kecil dari 99,03% pada 2021 menjadi 97,19% pada 2023. Rasio efisiensi menunjukkan kondisi tidak efisien, dengan realisasi belanja melebihi pendapatan pada 2022 dan 2023 sehingga rata-rata rasio mencapai 100,19%. Rasio pertumbuhan mengalami tren negatif dengan rata-rata penurunan 14,05% yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penurunan harga komoditas dan dampak pandemi COVID-19. Temuan ini menegaskan perlunya perencanaan anggaran yang lebih matang, diversifikasi sumber pendapatan desa, dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan agar desa dapat lebih adaptif menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.

Kata Kunci : Kinerja, Keuangan Desa, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Pertumbuhan, APBDes

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Ranga Village Government, Enrekang District, Enrekang Regency during the 2021–2023 period using three main indicators, namely the effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth ratio. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of budget realization reports. The results of the study indicate that the effectiveness ratio falls into the very effective category with an average achievement of 98.11%, although there was a slight decrease from 99.03% in 2021 to 97.19% in 2023. The efficiency ratio shows an inefficient condition, with expenditure realization exceeding revenue in 2022 and 2023, resulting in an average ratio of 100.19%. The growth ratio experienced a negative trend with an average decline of 14.05%, influenced by external factors such as declining commodity prices and the impact of the COVID-19 pandemic. These findings emphasize the need for more mature budget planning, diversification of village revenue sources, and increased efficiency in financial management so that villages can be more adaptive in facing future economic challenges.

Keywords: Financial Performance, Village Finance, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Growth Ratio, APBDes

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat lokal, kinerja pemerintah desa sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan efisien (Mardiasmo, 2021). Pengelolaan keuangan yang baik menjadi prasyarat utama agar

desa mampu memberikan pelayanan publik yang optimal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 selanjutnya mengatur mekanisme pengelolaan keuangan desa secara lebih rinci, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Rahman, 2023). Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi tolok ukur penting bagi kualitas tata kelola keuangan desa.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi isu strategis dalam era otonomi daerah. Laporan realisasi APBDes tidak hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik, tetapi juga instrumen evaluasi kinerja keuangan yang mencerminkan kemampuan desa mencapai target pendapatan, mengendalikan belanja, dan mengembangkan kapasitas fiskalnya (Cahyaning & Putri, 2023). Analisis kinerja keuangan desa umumnya menggunakan tiga rasio utama, yaitu rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan.

Rasio efektivitas mengukur sejauh mana realisasi pendapatan desa mencapai target yang telah ditetapkan, sementara rasio efisiensi membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan untuk menilai kehematan penggunaan anggaran (Jatnika et al., 2024). Rasio pertumbuhan menggambarkan perkembangan kapasitas fiskal desa dari tahun ke tahun. Ketiga rasio ini secara bersama-sama memberikan gambaran komprehensif mengenai kesehatan keuangan desa dan menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan.

Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar di sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan. Namun, potensi tersebut belum dioptimalkan sepenuhnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pada periode 2021–2023, desa ini menghadapi berbagai permasalahan fiskal, antara lain menurunnya transfer dari pemerintah pusat, ketidakseimbangan antara belanja dan pendapatan, serta defisit anggaran yang berulang (Santhi et al., 2023).

Situasi tersebut diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19 dan penurunan harga komoditas yang secara langsung menekan kemampuan desa dalam membiayai kegiatan pembangunan. Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai desa lain di Indonesia; penelitian Nurwana & Purwanto (2023) di Desa Leppangeng, Bone, menemukan bahwa meskipun efektivitas tergolong baik, efisiensi pengelolaan keuangan masih kurang optimal. Penelitian Santhi et al. (2023) di Desa Lembang Mesakada, Pinrang, juga menunjukkan rasio pertumbuhan yang cenderung negatif akibat faktor struktural serupa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Ranga periode 2021–2023 melalui tiga rasio keuangan: efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur kinerja keuangan desa, serta manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa dalam menyusun strategi keuangan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Mardiasmo, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk memberikan gambaran mendalam dan terperinci mengenai kinerja keuangan Pemerintah Desa Ranga pada periode 2021–2023 (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat eksploratif-deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan desa tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diamati. Lokasi penelitian adalah Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Subjek penelitian meliputi perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) observasi langsung terhadap proses pengelolaan keuangan desa; (2) wawancara mendalam dengan perangkat desa untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi realisasi anggaran; dan (3) dokumentasi berupa dokumen resmi APBDes dan laporan realisasi anggaran periode 2021–2023 (Jatnika et al., 2024).

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghitung tiga rasio keuangan. Pertama, rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan terhadap

target pendapatan yang telah ditetapkan. Kedua, rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan. Ketiga, rasio pertumbuhan dihitung berdasarkan perubahan realisasi pendapatan dari satu tahun ke tahun berikutnya (Cahyaning & Putri, 2023). Kriteria interpretasi mengacu pada standar yang digunakan dalam penelitian kinerja keuangan desa yang berlaku.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Desa Ranga Tahun Anggaran 2021–2023

NO.	Uraian	2021	2022	2023
1	Rasio Efektivitas	99,03%	98,12%	97,19%
2	Rasio Efisiensi	77,21%	104,27%	119,04%
3	Rasio Pertumbuhan	–	-9,33%	-18,76%
	Rata-rata			Efektivitas: 98,11% Efisiensi: 100,19% Pertumbuhan: - 14,05%

Sumber: APBDes Desa Ranga, diolah 2025

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Rasio Efektivitas Keuangan Desa Ranga 2021–2023

Berdasarkan perhitungan terhadap data realisasi APBDes Desa Ranga, rasio efektivitas selama periode 2021–2023 secara konsisten berada pada kategori sangat efektif. Pada tahun 2021, rasio efektivitas mencapai 99,03%, yang berarti realisasi pendapatan hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan target pendapatan yang realistis dan menerapkan mekanisme pemungutan pendapatan yang terstruktur.

Meskipun demikian, terjadi penurunan bertahap pada tahun-tahun berikutnya: rasio efektivitas turun menjadi 98,12% pada 2022 dan 97,19% pada 2023. Rata-rata rasio efektivitas selama tiga tahun tersebut adalah 98,11%, yang masih berada jauh di atas ambang batas kategori efektif (90%). Penurunan bertahap ini disebabkan oleh faktor eksternal, terutama fluktuasi harga komoditas lokal dan dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada desa.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Desa Ranga 2021–2023

Berbeda dengan rasio efektivitas, rasio efisiensi Desa Ranga menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan selama periode pengamatan. Pada tahun 2021, desa berhasil mencatat rasio efisiensi sebesar 77,21%, yang berarti realisasi belanja jauh di bawah realisasi pendapatan dan tergolong efisien. Pencapaian ini disebabkan oleh kemampuan desa menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

Namun, kondisi berbalik pada 2022 dan 2023. Rasio efisiensi melonjak menjadi 104,27% pada 2022 dan 119,04% pada 2023, yang berarti realisasi belanja melebihi pendapatan yang diterima. Rata-rata rasio efisiensi tiga tahun mencapai 100,19%, mengindikasikan kondisi tidak efisien secara keseluruhan. Peningkatan belanja ini dipicu oleh biaya tak terduga akibat program pembangunan yang mendesak serta penyesuaian upah tenaga kerja lokal akibat inflasi, di tengah penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

3. Rasio Pertumbuhan Keuangan Desa Ranga 2021–2023

Rasio pertumbuhan Desa Ranga menunjukkan tren negatif selama periode pengamatan. Pada tahun 2022, pendapatan desa mengalami penurunan sebesar 9,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini semakin tajam pada 2023 dengan kontraksi sebesar 18,76% dibandingkan tahun 2022. Rata-rata penurunan pendapatan selama 2021–2023 adalah

14,05%, mengindikasikan tekanan fiskal yang signifikan dan berkelanjutan terhadap kemampuan keuangan desa.

Penurunan ini dipicu oleh dua faktor utama yang saling memperkuat: pertama, melemahnya harga komoditas pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama PADes; dan kedua, dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat desa sehingga menurunkan basis penerimaan desa secara keseluruhan. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, ketidakstabilan sumber pendapatan dan keterbatasan diversifikasi PADes menjadi faktor struktural yang memperparah tren penurunan tersebut.

Pembahasan

1. Efektivitas Pendapatan: Kinerja Tinggi di Tengah Tekanan Eksternal

Capaian rata-rata rasio efektivitas sebesar 98,11% menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ranga memiliki kapasitas perencanaan yang baik dan mekanisme pemungutan pendapatan yang andal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurwana & Purwanto (2023) di Desa Leppangeng, Bone, yang juga menemukan rasio efektivitas di atas 90% dan mengkategorikannya sebagai sangat efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa desa-desa di Sulawesi Selatan umumnya mampu merealisasikan pendapatan mendekati target, terutama karena ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat (ADD dan DD) yang relatif terencana.

Namun, penurunan bertahap dari 99,03% (2021) menjadi 97,19% (2023) perlu mendapat perhatian serius. Temuan ini berbanding terbalik dengan hasil Huda (2022) yang menemukan rasio efektivitas hanya 47,11% di Desa Serasah, menunjukkan bahwa konteks daerah dan komposisi sumber pendapatan sangat menentukan kinerja efektivitas. Desa Ranga yang masih mengandalkan transfer pemerintah pusat cenderung lebih mudah mencapai target, tetapi juga rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional (Mardiasmo, 2021). Untuk menjaga rasio ini, perencanaan target pendapatan perlu terus didasarkan pada analisis kondisi ekonomi lokal yang akurat dan realistis.

2. Inefisiensi Belanja: Tantangan Pengendalian Anggaran

Kondisi inefisiensi yang ditandai oleh rasio belanja yang melebihi pendapatan pada 2022 dan 2023 merupakan temuan yang paling mengkhawatirkan dalam penelitian ini. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 100,19% menandakan bahwa secara rata-rata, setiap satu rupiah pendapatan yang diterima desa justru diikuti oleh pengeluaran lebih besar dari satu rupiah. Kondisi ini mencerminkan defisit anggaran yang berulang dan mengancam keberlanjutan fiskal desa (Cahyaning & Putri, 2023).

Temuan ini kontras dengan kondisi efisien yang dicatat Martiastuti et al. (2021) di Kecamatan Meurah Dua dengan rata-rata rasio efisiensi 98% selama 2015–2019, sebelum pandemi melanda. Perbedaan ini menegaskan bahwa guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19 dan kenaikan harga bahan pokok berdampak besar pada kemampuan desa mengontrol belanja. Senada dengan temuan Santhi et al. (2023) di Desa Lembang Mesakada yang juga mencatat inefisiensi serupa, kondisi Desa Ranga mencerminkan pola umum desa-desa yang pendapattannya tertekan namun kebutuhan belanja pembangunan tetap tinggi. Solusi jangka pendek yang perlu diterapkan adalah pengetatan prioritas anggaran dan pengurangan belanja operasional yang tidak mendesak.

3. Tren Negatif Pertumbuhan: Urgensi Diversifikasi Pendapatan

Rata-rata penurunan pendapatan sebesar 14,05% per tahun merupakan indikasi serius bahwa model fiskal Desa Ranga tidak berkelanjutan dalam jangka panjang jika tidak dilakukan reformasi struktural. Temuan ini paralel dengan hasil Huda (2022) yang juga menemukan tren pertumbuhan negatif di Desa Serasah akibat ketergantungan pada sumber pendapatan tunggal yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Ketergantungan pada harga komoditas sebagai komponen PADes menjadikan desa sangat rentan terhadap siklus harga pasar yang berada di luar kendali pemerintah desa.

Jatnika et al. (2024) menekankan bahwa kemandirian keuangan daerah, termasuk desa, sangat bergantung pada kemampuan mengoptimalkan PADes melalui diversifikasi sumber pendapatan. Desa Ranga memiliki potensi di sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan yang belum dikelola secara optimal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan BUMDes yang berbasis potensi lokal dapat menjadi solusi strategis untuk

menciptakan sumber PADes yang lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat (Rahman, 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Ranga bersifat asimetris: efektivitas tinggi namun efisiensi rendah dan pertumbuhan negatif. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kemampuan merealisasikan pendapatan belum diimbangi dengan pengelolaan belanja yang proporsional dan pengembangan kapasitas fiskal yang memadai. Mardiasmo (2021) menegaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik mensyaratkan keseimbangan antara ketiga aspek tersebut agar dapat menciptakan layanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Ranga Kecamatan Enrekang periode 2021–2023 menunjukkan hasil yang asimetris. Rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata 98,11%, mencerminkan kemampuan desa yang baik dalam merealisasikan target pendapatan. Namun, rasio efisiensi menunjukkan kondisi tidak efisien dengan rata-rata 100,19% karena realisasi belanja melebihi pendapatan pada 2022 dan 2023, mengindikasikan adanya defisit anggaran yang berulang. Rasio pertumbuhan memperlihatkan tren negatif dengan rata-rata penurunan 14,05% per tahun, dipengaruhi oleh melemahnya harga komoditas dan dampak pandemi COVID-19.

Secara keseluruhan, meskipun desa mampu mencapai target pendapatan dengan baik, pengelolaan belanja dan pengembangan kapasitas fiskal masih perlu diperbaiki secara struktural agar kinerja keuangan desa lebih seimbang dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah Desa Ranga disarankan untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan penetapan prioritas belanja yang lebih ketat guna mengurangi inefisiensi. Diversifikasi sumber PADes melalui pengembangan BUMDes yang memanfaatkan potensi perkebunan, pertanian, dan peternakan lokal perlu diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dan stabilisasi pertumbuhan pendapatan. Penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan desa juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan manajemen keuangan dan sistem pelaporan berbasis digital.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan membandingkan beberapa desa di Kecamatan Enrekang agar diperoleh gambaran komparatif yang lebih komprehensif. Pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik untuk mengukur hubungan antara rasio keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga direkomendasikan agar hasil penelitian lebih aplikatif sebagai dasar kebijakan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaning, E., & Putri, F. (2023). Pengaruh rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4). <https://doi.org/10.55587/jla.v2i4.85>
- Endah, K. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 76–82.
- Huda, N. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari (periode tahun 2018–2020). [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi].
- Jatnika, I., Suryadi, D., & Suryadi, E. E. (2024). Membangun kemandirian keuangan daerah: Kasus pendapatan asli dan belanja modal Pemda Purwakarta. *Mega Press Nusantara*.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & manajemen keuangan daerah: Edisi terbaru. Penerbit Andi.

- Martiasuti, H. I., Nugroho, A., & Widyawati, W. (2021). Analisis kinerja keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(2).
- Nurwana, A., & Purwanto, A. (2023). Analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone. *Precise Journal of Economic*, 2(1).
- Rahman, M. A. (2023). Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa: Studi kasus Desa Tabanio. [Skripsi].
- Santhi, A., Akhsan, A., & Rahma, R. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah Desa Lembang Mesakada Kabupaten Pinrang. *Journal AK-99*, 3(2).